



Strategi Penguatan Industri Mikro dan Kecil Berbasis Potensi Lokal di Provinsi Kalimantan Barat

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Tukkot Hamonangan Immanuel Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia tukkot.h.immanuel@itbss.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Immanuel, T. H. (2026). Strategi Penguatan Industri Mikro dan Kecil Berbasis Potensi Lokal di Provinsi Kalimantan Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1),886-892.

Abstrak

Industri Mikro dan Kecil (IMK) memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi IMK di Provinsi Kalimantan Barat serta merumuskan strategi penguatan berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan literatur ilmiah (BPS, 2024; Tambunan, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sektor dominan dengan berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya adopsi teknologi. Strategi penguatan yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi usaha, akses pembiayaan, dan kolaborasi stakeholder. Sinergi antar pihak menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem IMK yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Industri Mikro dan Kecil (IMK), UMKM, strategi penguatan, ekonomi lokal, kebijakan daerah, digitalisasi, daya saing, Kalimantan Barat

Abstract

Micro and Small Industries (MSIs) play a strategic role as drivers of local economic growth and job creation. This study aims to analyze the condition of MSIs in West Kalimantan Province and to formulate strengthening strategies based on local potential. The method used is a descriptive-analytical approach utilizing secondary data from Statistics Indonesia and relevant scientific literature (BPS, 2024; Tambunan, 2019). The results indicate that the agricultural sector, manufacturing industry, and trade are the dominant sectors, facing various challenges such as limited capital, low quality of human resources, and minimal adoption of technology. The proposed strengthening strategies include enhancing human resource capacity, business digitalization, improving access to financing, and fostering stakeholder collaboration. Synergy among stakeholders is a key factor in creating a competitive and sustainable MSI ecosystem.

Keywords: Micro and Small Industries (MSIs), SMEs, strengthening strategy, local economy, regional policy, digitalization, competitiveness, West Kalimantan

A. Pendahuluan

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur menempati posisi lima besar dengan jumlah unit usaha IMK terbanyak secara nasional. Dominasi tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi berbasis usaha kecil, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan serta penguatan ekonomi lokal.

Fenomena tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Provinsi Kalimantan Barat yang masih berada pada posisi menengah dalam distribusi jumlah IMK secara nasional. Analisis terhadap kesenjangan ini penting untuk mengidentifikasi potensi sumber daya lokal, keunggulan komparatif daerah, serta peluang pengembangan sektor IMK sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, penguatan posisi dan peran IMK di setiap sektor ekonomi di tingkat kabupaten/kota menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, pembelajaran dari provinsi-provinsi dengan kinerja IMK yang lebih maju dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual. Namun demikian, perbandingan antar wilayah tidak dapat dilakukan secara langsung, mengingat adanya perbedaan historis, struktur ekonomi, kebijakan fiskal, serta dinamika sosial-ekonomi yang berkembang dalam jangka waktu yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih relevan adalah melakukan rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, ekosistem usaha di Kalimantan Barat juga mengalami transformasi dari dominasi sektor agraris menuju sektor perdagangan dan industri berbasis nilai tambah. Pemanfaatan platform digital, media sosial, dan teknologi produksi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, serta memperluas akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing IMK tidak hanya ditentukan oleh faktor sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global.

Berdasarkan hasil survei IMK di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, sebagian besar unit usaha merupakan usaha padat karya yang berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal. Salah satunya yang tumbuh secara signifikan dalam padat karya sektor IMK di kota Pontianak adalah usaha Laundry (Immanuel & Eduardo, 2026). Sektor-sektor seperti industri makanan, pengolahan kayu dan furnitur, tekstil dan pakaian jadi, agribisnis, serta industri pengolahan lainnya menjadi basis utama aktivitas IMK di daerah ini. Namun demikian, tantangan dalam bentuk keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya adopsi teknologi masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing.

Meskipun demikian, dengan jumlah mencapai 48.456 unit usaha, IMK di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Optimalisasi potensi sumber daya alam lokal serta penguatan sektor unggulan dapat menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengembangan sebagian unit usaha unggulan sebagai agen pertumbuhan (*growth drivers*) juga dapat menjadi pendekatan efektif dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis IMK.

Adapun berbagai penelitian telah mengkaji peran IMK dalam perekonomian, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek umum seperti akses pembiayaan, kinerja usaha, dan penyerapan tenaga kerja (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; Tambunan, 2019). Kajian terkait digitalisasi dan peningkatan daya saing juga telah berkembang, namun umumnya bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka strategi pembangunan daerah yang komprehensif (OECD, 2018; Zhao et al., 2020). Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji penguatan IMK berbasis potensi lokal di Provinsi Kalimantan Barat masih relatif terbatas.

IMK/UMKM berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya pengelolaan manajerial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan UMKM yang

terintegrasi dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kalimantan Barat (Immanuel, 2026).

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan dalam pendekatan analisis yang mengintegrasikan faktor-faktor kunci seperti penguatan sumber daya manusia, digitalisasi usaha, akses pembiayaan, serta kolaborasi antar stakeholder ke dalam satu model strategi yang holistik. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme penguatan IMK dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi IMK di Provinsi Kalimantan Barat serta merumuskan strategi penguatan berbasis potensi lokal yang terintegrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah IMK berdasarkan Provinsi per 2024

No Provinsi	Jumlah IMK (Unit)	Keterangan
1 Jawa Timur	925.900	Terbesar nasional
2 Jawa Tengah	887.500	Konsentrasi industri tinggi
3 Bali	147.000	Dominan sektor pariwisata & kreatif
4 Jawa Barat	145.200	Industri manufaktur & UMKM kuat
5 Nusa Tenggara Timur	145.200	Berbasis sumber daya lokal
6 Kalimantan Barat	48.456	Peringkat 22 nasional
Total Nasional	±4.400.000	Akumulasi seluruh sektor

Sumber : Data BPS IMK (2024)

Kajian Data dan Analisis

Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa distribusi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, dengan Jawa Timur (925,9 ribu unit), Jawa Tengah (887,5 ribu unit), dan Jawa Barat (145,2 ribu unit) sebagai kontributor utama. Di luar Pulau Jawa, Bali (147 ribu unit) dan Nusa Tenggara Timur (145,2 ribu unit) melengkapi lima besar nasional. Secara keseluruhan, jumlah IMK nasional mencapai sekitar 4,4 juta unit usaha. Dalam konteks tersebut, Provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi ke-22 dengan 48.456 unit usaha, yang menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan provinsi dengan kinerja IMK tertinggi.

Fokus analisis tidak diarahkan pada perbandingan langsung antar provinsi, melainkan pada identifikasi sektor unggulan dan potensi daya ungkit ekonomi dari IMK di Kalimantan Barat. Hal ini mencakup penentuan sektor prioritas, penguatan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai fasilitator, serta optimalisasi intervensi kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas usaha.

Pendekatan strategis dapat dilakukan melalui pengembangan sebagian unit usaha unggulan, misalnya sekitar 10% dari total IMK, sebagai agen pertumbuhan dengan dukungan akses pembiayaan, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi produksi dan pengolahan yang sesuai standar pasar. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi IMK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan memperkuat peran produk berbasis kearifan lokal.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan fokus pada analisis kualitatif tanpa melakukan komparasi kuantitatif antar provinsi. Kajian didasarkan pada data sekunder, literatur ilmiah, serta pemahaman terhadap dinamika ekosistem industri di era global.

Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa permasalahan dan karakteristik Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada dasarnya relatif serupa di berbagai wilayah, sehingga faktor pembeda utama terletak pada strategi pengelolaan sumber daya internal dan kemampuan pelaku usaha

dalam memanfaatkan peluang pasar untuk mencapai posisi kompetitif, baik sebagai pemimpin pasar (market leader) maupun penantang pasar (market challenger).

Analisis dilakukan melalui berbagai perspektif untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan alternatif solusi yang aplikatif. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan yang bersifat strategis, khususnya dalam mendorong peran IMK sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pendekatan penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, sektor perbankan, dan dukungan platform digital, dalam membangun ekosistem IMK yang kompetitif dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan volume perdagangan di tingkat daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

Data menunjukkan bahwa IMK di Kalimantan Barat didominasi oleh usaha padat karya dengan keterbatasan modal dan ketergantungan pada tenaga kerja keluarga, namun memiliki peran signifikan dalam perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis potensi wilayah, dengan menekankan penguatan daya saing, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta transformasi menuju usaha yang lebih formal dan berkelanjutan (Sulistiowati et al., 2024).

Peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam membangun ekosistem IMK yang kompetitif melalui penguatan regulasi, fasilitasi pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi dan akses pasar. Secara keseluruhan, profil IMK Kalimantan Barat mencerminkan potensi yang besar, namun memerlukan strategi penguatan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Poin poin analisis berikut membutuhkan langkah lanjutan dan program pembangunan yang inklusif terhadap keberadaan IMK sebagai salah satu pendekatan pembangunan berkelanjutan.

a. Sektor Industri pengolahan

Dinas terkait industri di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan sektor pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang mendominasi usaha industri mikro dan kecil (IMK). Sektor ini mencakup industri makanan, kerajinan, serta pengolahan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan produk lokal unggulan lainnya. Namun, rendahnya kualitas pengolahan dan manajemen usaha masih menjadi kendala utama dalam pemasaran (Caldera et al., 2019). Di Kalimantan Barat, terdapat wilayah yang menghasilkan produk olahan khas seperti kratom, lidah buaya, dan penangkaran ikan arwana yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pengembangan industri pengolahan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

b. Struktur Ekonomi Daerah

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, struktur ekonomi daerah yang terkait industri mikro dan kecil (IMK) didominasi sektor pertanian (21,50%), industri (16,02%), dan perdagangan (13,89%). Aktivitas IMK berfokus pada pengolahan bahan baku lokal untuk meningkatkan nilai tambah, meskipun masih menghadapi keterbatasan permodalan dan adaptasi teknologi. Penguatan karakteristik padat karya melalui pelatihan teknis diperlukan untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDB dan penerimaan pajak, sekaligus mendorong struktur ekonomi yang adaptif dan kompetitif di pasar domestik maupun ekspor.

c. Angkatan Kerja

Kinerja IMK juga dipengaruhi oleh kebijakan pengupahan (UMR/UMP) dan kualitas tenaga kerja. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program pelatihan berbasis kemitraan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dengan dominasi pekerja perempuan sebesar 55,15% yang umumnya belum terdidik dan terlatih, peningkatan kapasitas diharapkan mampu menggeser pola padat karya menjadi tenaga kerja terampil serta meningkatkan skala dan profesionalisme usaha IMK.

d. Potensi Komoditas

Sumber daya lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, dan lidah buaya memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah apabila diolah dengan orientasi pasar. Pengembangan komoditas ini dapat meningkatkan nilai tambah serta memperluas peluang ekspor produk jadi maupun bahan baku.

e. Platform Digital

Sebanyak 48.456 unit IMK merupakan potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Optimalisasi ini memerlukan dukungan platform digital yang terintegrasi, disertai pelatihan, pembinaan, serta kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi tuntutan digitalisasi (Zhao et al., 2020).

f. Permodalan dan Investasi

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan melalui perbankan membuka peluang bagi IMK untuk memperoleh modal dan investasi. Namun, akses tersebut bergantung pada kinerja keuangan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pelaku IMK menjadi bankable dan meningkatkan skala usaha, mengingat kinerja keuangan merupakan faktor krusial dalam keberlanjutan bisnis (Hanni et al., 2023).

g. Strategi Pemasaran dan Digitalisasi

Digitalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pemasaran IMK. Pemanfaatan e-commerce, marketplace, dan media sosial memungkinkan perluasan pasar secara efisien dan berkelanjutan. Rendahnya adaptasi terhadap pemasaran digital mencerminkan keterbatasan manajemen pemasaran (Caldera et al., 2019). Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan kualitas produk menjadi kunci dalam menjaga profitabilitas, likuiditas, dan daya saing di pasar digital (Nabbal et al., 2023).

Pembahasan seperti diuraikan diatas. Seiring dengan tantangan pasar domestik maupun pasar lokal, persaingan unit unit usaha IMK sedang berlangsung ketat.

Diwarnai keterbatasan sumber sumber daya internal (produksi, modal, kualitas tenaga kerja, pemasaran dan pasar, teknologi produksi, platform digital dll) maka beragam strategi penguatan menejemen, penguatan organisasi bahkan pengembangan kemitraan lintas sektoral dan wilayah akan menunjukkan indikator usaha makin maju dan berkembang (Zhao dkk,2020).

Pelaku usaha atau perusahaan memiliki budaya bisnis yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualifikasi berkompetisi dalam era tarik ulur pasar. Rebutan mitra suplier, gesekan segmentasi pelanggan maupun pola keuangan yang efisien dan efektif pasti mampu memposisikan usaha/perusahaan bertahan bahkan berkembang dalam pengelolaan aktiva dan hutang. Terus berinovasi dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat berubah di era digital saat ini.

Pertumbuhan jumlah pelaku/perusahaan IMK di wilayah Kalbar secara simultan harus berfokus pada pengembangan kualitas SDM di di semua level menejemen organisasi. Tidak hanya pekerja operator. Juga peningkatan kualitas SDM para pelaku dalam aspek menejerial, penguasaan pasar dan pemasaran serta pemanfaatan teknologi untuk proses produksi maupun alat bantu kerja yang sepenuhnya semakin bergeser dengan sarana kerja teknologi.

Pemecahan faktor masalah diatas tentu bukan proses singkat. Berkelanjutan. Karena menyangkut pengembangan SDM dalam mekanisme pasar yang sangat kompetitif. Peran Pemprov Kalbar di jenjang organisasi pemerintahan daerah (OPD) maupun maupun kedinasan sangat strategis. Pejabat dan para ASN turun langsung sebagai mitra pembelajar bersama pelaku usaha/ pengusaha untuk meretas pokok persoalan utama demi mencari solusi bersama demi kepentingan pembangunan perekonomian dan dunia industri itu sendiri.

Karena setelah identifikasi permasalahan, kendala dan hambatan tentu strategi dan program kerja berikutnya adalah menemukan solusi. Kemitraan dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kata kunci. Melalui identifikasi faktor faktor penyebab masalah dan metode pemecahannya adalah bagian tidak terpisahkan dari keberadaan IMK di wilayah pemprov Kalbar dan nasional.

Ada rencana tindak lanjut secara terencana, sistemik dan terukur dengan alokasi anggaran dan pembiayaan demi menjawab tuntutan dan tantangan IMK mampu menjadi pondasi dasar dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Bahkan menjadi akselerator dan distributor dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan kesejahteraannya di era digital saat ini.

Seiring pertumbuhan jumlah pelaku usaha/perusahaan dengan makin meluasnya jenis sektor IMK yang beroperasi, maka tupoksi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa keunggulan sumber sumber daya lokal maupun potensi spesifik kewilayahan harus mampu membuka peluang kewirausahaan (Caldera dkk,2019) dan memperbesar partisipasi warga masyarakat lokal mendapatkan kerja formal dan lapangan kerja informal meluas guna peningkatan pendapatan pekerja beserta keluarganya.

D. Kesimpulan

Transformasi peradaban sedang bergeser dari masyarakat agraris memasuki pola perdagangan dan industri. Situasi kondisi ini tidak hanya sedang berproses di wilayah provinsi Kalbar tetapi juga di wilayah daerah lain. Di tahapan dan proses transformasi ini pun masih banyak program pembangunan yang belum menyentuh hakekat hajat hidup warga dan kehidupan keluarga.

Sementara proses penyesuaian dan pembelajaran pada fase transformasi ini belum tuntas di level pengusaha, pelaku usaha, para birokrat dan ASN hingga ke level warga masyarakat terbawah, arus teknologi informasi dan platform digital sudah turut menambah beban profesional maupun beban hidup. Modernisasi, pasar global dan perkembangan peradaban digital bahkan sedang mengikis struktur sosial, budaya dan tradisi di setiap wilayah nusantara ini.

Aksioma dari kesimpulan adalah kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kemakmuran warga negara di setiap satuan setempat. Birokrasi sebagai fasilitator anggaran APBD berkewajiban untuk menaikkan status kapasitas dan kompetensi dari semua pemangku kepentingan yang terkait erat dengan pertumbuhan perekonomian daerah.

Anggaran fiskal dana daerah dari hasil perolehan pajak dan dana alokasi pemerintah pusat wajib dikelola dengan tepat sasaran dengan indikator manfaat dan portofolio sukses di daerah langsung. Era teknologi dan platform digital memposisikan pelaku /perusahaan IMK sebagai mitra strategis dari birokrasi, mitra pengusaha lintas sektor, lembaga perbankan dan pembiayaan dan warga masyarakat langsung dalam mekanisme pasar bebas yang semakin kompetitif.

Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun, berbagai keterbatasan internal dan eksternal masih menjadi hambatan utama dalam pengembangannya.

Strategi penguatan IMK harus berbasis pada:

1. potensi lokal
2. peningkatan kualitas SDM
3. digitalisasi usaha
4. akses pembiayaan

Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam menciptakan IMK yang kompetitif dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2015). *Analisis pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara*. Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Data industri mikro dan kecil Provinsi Kalimantan Barat. BPS.
- Caldera, H. T. S., Desha, C., & Dawes, L. (2019). Evaluating the enablers and barriers for successful implementation of sustainable business practice in lean SMEs. *Journal of Cleaner Production*, 218, 575–590. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.239>
- Darwanto, D., & Raharjo, S. T. (2018). Pengembangan produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian berbasis potensi lokal. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*.
- Dhiyaa'ulhaq, M., Sahara, S., & Juanda, B. (2023). Pengaruh industri mikro dan kecil terhadap kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *TATALOKA*, 25(3), 133–144.
- Febrian, L. D., & Kristianti, I. (2020). Identifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan UMKM (studi kasus pada UMKM di Kabupaten Magelang). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.799>
- Immanuel, T. H. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Covid-19: Analisis Deskriptif di Provinsi Kalimantan Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2070>
- Immanuel, Tukkot Hamonangan dan Eduardo, Farrell Ionwyn. (2026), Motif Ekonomi, Sosial, dan Psikologis dalam Keputusan Investasi Usaha Laundry Baru: Studi Kualitatif UMKM di Pontianak Barat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 9 No 1, 2599-3410. <https://doi.org/10.36778/jesya.v9i1.2474>

- Isa, M., Mangifera, L., Praswati, A. N., Sina, H. K., Wahyudi, A., Suwondo, A., & Kurniawan, W. (2023). Model penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(1), 105–120.
- Jordão, R. V. D., Almeida, V. D., & Novas, J. (2022). Intellectual capital, sustainable economic and financial performance, and value creation in emerging markets: The case of Brazil. *The Bottom Line*, 35(1).
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Nabbal, F., Afifah, A. N., & Panggiarti, E. K. (2023). Proses akuisisi perusahaan: Strategi, tantangan, dan dampaknya bagi kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 293–298. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1474>
- Nu'man, A. H. (2005). Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah sebagai upaya untuk menghadapi era perdagangan bebas (suatu model konseptual dalam pengembangan IKM). *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(3), 388–415.
- Pebriyanti, J., Syahidatulrodiahtillah, & Tedjaningsih, I. (2025). Pengembangan potensi UMKM berbasis sumber daya lokal dalam mendorong perekonomian di Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 108–117. <https://doi.org/10.15575/commen.v3i2.1667>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara.
- Sinaga, D. R. (2020). Pengembangan UMKM di era digitalisasi: Tantangan dan strategi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 115–126.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Suharto, E. (2018). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Sulistiowati, S., Fransiskus, R., Komari, N., & Afifah, N. (2024). Analisis kewirausahaan dan kinerja usaha. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(1). <https://doi.org/10.26418/jebik.v13i1.72440>
- Suyatno. (2022). Pengembangan potensi UMKM berbasis lokal dalam mendorong perekonomian di Desa Girikerto. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>
- Syikin, N., Mane, A., & Jafar, S. (2020). Pengaruh perkembangan ekonomi digital terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kuliner di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Economic Bosowa Journal*, 37.
- Tambunan, T. (2017). *Usaha mikro kecil menengah*. Ghalia Indonesia.
- Zhao, E. Y., Ishihara, M., & Jennings, P. D. (2020). Strategic entrepreneurship's dynamic tensions. *Journal of Business Venturing*, 35(2), 105933. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.04.001>